

Gerakan Perempuan Pasca Reformasi

Mohammad Nadhir Muammar¹, Fauzan Anwar Zunaedi²,

Diran Murtado³, Abdul Haris Citra Atmaja⁴

¹Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, nadhir.muammar@uinsgd.ac.id

²Universitas Padjadjaran, fauzananwarz10@gmail.com

³Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, diran.m@gmail.com

⁴Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, haris.atmaja@uinsgd.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran politik perempuan dalam konteks sejarah Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini memanfaatkan berbagai sumber data, termasuk literatur sejarah dan arsip pemerintahan, untuk mengetahui kontribusi perempuan dalam politik sejak era perjuangan kemerdekaan hingga masa Reformasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan Indonesia telah memainkan peran penting dalam berbagai gerakan politik dan sosial, meskipun seringkali mereka dihadapkan pada tantangan yang bersumber dari norma budaya dan struktural. Sejak era perjuangan kemerdekaan, perempuan telah terlibat aktif dalam aksi-aksi revolusioner, dan perannya semakin berkembang dalam konteks politik pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan khususnya pada era Reformasi. Program tindakan afirmatif sejak tahun 2004 telah meningkatkan partisipasi perempuan di lembaga legislatif, namun perempuan masih dibayangkan mempunyai beban ganda yaitu tanggung jawab domestik dan publik. Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam mengenai dinamika peran politik perempuan dan tantangan yang mereka hadapi, serta pentingnya dukungan masyarakat luas dalam mewujudkan sistem politik sensitif gender di Indonesia.

Kata Kunci: Peran Politik Perempuan, Sejarah Indonesia, Kesetaraan Gender, Partisipasi Politik, Reformasi, Affirmative Action, Beban Ganda

Abstract

This research aims to examine the political role of women in the context of Indonesian history. Using a qualitative approach, this research utilizes various data sources, including historical literature and government archives, to investigate the contribution of women in politics from the era of the independence struggle to the Reformation period. The research results show that Indonesian women have played an important role in various political and social movements, even though they are often faced with challenges originating from cultural and structural norms. Since the era of the struggle for independence, women have been actively involved in revolutionary actions, and their role developed further in the political context during the Old Order, New Order, and especially in the Reformation era. Affirmative action programs since 2004 have increased women's participation in the legislature, but women are still imagined to have a double burden of domestic and public responsibilities. This research provides an in-depth understanding of the dynamics of women's political roles and the challenges they face, as well as the importance of wider community support in realizing a gender-sensitive political system in Indonesia.

Keywords: *Women's Political Role, Indonesian History, Gender Equality, Political Participation, Reform, Affirmative Action, Double Burden*

Pendahuluan

Gerakan Perempuan Reformasi di Indonesia memiliki tujuan fundamental dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, kesetaraan gender, dan partisipasi aktif perempuan dalam berbagai sektor kehidupan, khususnya dalam ranah politik, ekonomi, dan sosial. Gerakan ini muncul sebagai bagian integral dari gelombang reformasi yang lebih luas di Indonesia, yang menuntut perubahan menuju tatanan sosial dan politik yang lebih demokratis, inklusif, dan adil (Blackburn, 2004).

Dalam periode reformasi, tuntutan untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif dan adil menjadi semakin mengemuka. Sebagaimana dinyatakan oleh Blackburn, “The role of women in the reformasi movement has been pivotal in shaping the trajectory of democratic reforms in Indonesia” (Blackburn, 2004). Perempuan tidak hanya menjadi peserta pasif tetapi juga sebagai agen perubahan yang aktif, yang menuntut peran yang lebih besar dan pengakuan dalam berbagai sektor.

Peran serta perempuan dalam gerakan ini sangat krusial dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan merata. Perempuan Indonesia menghadapi berbagai tantangan, mulai dari diskriminasi gender hingga keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi dan politik. Namun, melalui Gerakan Perempuan Reformasi, mereka berusaha mengatasi hambatan-hambatan ini dan mendorong perubahan struktural yang mendalam dalam masyarakat Indonesia.

Gerakan ini juga mencerminkan aspirasi yang lebih luas untuk keadilan sosial dan kesetaraan gender. Menurut Robinson, “The reform era has provided a crucial opportunity for women’s movements to advance their agenda in a way that was not possible under the New Order” (Robinson, 2009). Dalam konteks ini, partisipasi aktif perempuan menjadi esensial dalam mewujudkan reformasi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Dengan demikian, Gerakan Perempuan Reformasi bukan hanya tentang perjuangan hak-hak perempuan semata, tetapi juga merupakan bagian penting dari upaya untuk membangun masyarakat Indonesia yang lebih demokratis dan adil. Partisipasi perempuan dalam gerakan ini menandai komitmen mereka untuk menciptakan perubahan yang substansial dalam tatanan sosial dan politik di Indonesia.

Tujuan utama dari Gerakan Perempuan Reformasi adalah menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan berkeadilan gender di Indonesia. Gerakan ini berkomitmen untuk mengatasi segala bentuk diskriminasi gender, memperjuangkan hak-hak perempuan, dan menciptakan lingkungan yang memungkinkan perempuan untuk mencapai potensi penuh mereka. Nani Zulminarni, seorang tokoh perempuan terkemuka dalam gerakan ini, menekankan pentingnya partisipasi perempuan dalam proses reformasi dengan menyatakan, "Perempuan harus memainkan peran penting dalam proses pembangunan demokratis, yang pada gilirannya akan membawa perubahan yang lebih baik bagi kehidupan perempuan itu sendiri" (Zulminarni, 2010).

Gerakan Perempuan Reformasi tidak hanya membatasi diri pada isu-isu gender, tetapi juga berupaya untuk memastikan bahwa perempuan memiliki suara yang signifikan dalam pembangunan dan pengambilan keputusan di semua tingkat masyarakat. Dengan demikian, gerakan ini berfungsi sebagai katalis untuk transformasi sosial yang lebih luas, berusaha mewujudkan tatanan sosial yang lebih demokratis dan adil. Ini mencerminkan aspirasi untuk membangun sebuah masyarakat di mana setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam semua aspek kehidupan publik dan pribadi.

Gerakan ini berkomitmen untuk melawan segala bentuk diskriminasi gender, memperjuangkan hak-hak perempuan, dan menciptakan lingkungan yang mendukung perempuan dalam mencapai potensi penuh mereka.

Gerakan Reformasi merupakan periode penting dalam sejarah politik Indonesia yang dimulai pada tahun 1998 dengan jatuhnya rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Berikut adalah beberapa peristiwa penting dalam kronologi Reformasi.

Pertama di tahun 1998: Tragedi Reformasi dimulai dengan kerusuhan dan demonstrasi massal di berbagai kota Indonesia. Pada masa ini, tekanan terhadap pemerintah mencapai puncaknya seiring dengan krisis ekonomi yang melanda Asia, yang semakin memperburuk kondisi sosial dan politik di Indonesia (Schwarz, 1999).

Kedua 21 Mei 1998: Pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden Indonesia, setelah 32 tahun berkuasa, menandai titik balik penting dalam sejarah Indonesia. Pengunduran

dirinya terjadi setelah tekanan terus menerus dari demonstrasi mahasiswa dan masyarakat luas yang menuntut perubahan (Aspinall, 2005). Setelahnya pergantian kepemimpinan presiden diganti oleh BJ Habibie.

Ketiga Reformasi politik meliputi amandemen UUD 1945, pemilihan umum yang lebih bebas, dan kebebasan berekspresi. Salah satu pencapaian utama adalah pelaksanaan pemilu yang lebih transparan dan adil, yang memungkinkan partisipasi politik yang lebih luas dan inklusif (Uhlen, 1997).

Keempat Reformasi ekonomi dengan privatisasi sejumlah perusahaan BUMN dan deregulasi ekonomi. Langkah-langkah ini diambil untuk mengatasi krisis ekonomi yang parah dan untuk membangun kembali kepercayaan investor dalam perekonomian Indonesia (Hill, 2000).

Kelima pada tahun 2004 Pemilihan Presiden secara langsung yang diikuti oleh pemilihan umum legislatif, menandai tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Pemilihan ini adalah yang pertama kali dalam sejarah Indonesia di mana rakyat dapat memilih presiden secara langsung, memperkuat proses demokratisasi dan legitimasi pemerintah (Sherlock, 2009).

Peran perempuan dalam Gerakan Reformasi tidak dapat diabaikan. Mereka aktif terlibat dalam berbagai aksi demonstrasi, kampanye sosial, dan advokasi untuk perubahan menuju tatanan politik yang lebih demokratis dan inklusif. Perempuan telah menjadi tulang punggung di banyak gerakan masyarakat sipil yang memperjuangkan hak asasi manusia, keadilan, dan kesetaraan gender. Peran mereka sangat penting dalam berbagai gerakan reformasi di Indonesia, termasuk dalam Gerakan Reformasi yang dimulai pada tahun 1998. Salah satu contoh paling menonjol dari peran perempuan dalam Gerakan Reformasi adalah penunjukan Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Indonesia pada tahun 2001. Ini merupakan pencapaian signifikan dalam perjalanan politik Indonesia, menandai pertama kalinya seorang perempuan memegang jabatan tertinggi di negara Indonesia. Sebagaimana dinyatakan oleh Bolland, *"The rise of Megawati to the presidency was not only a personal victory but also a significant milestone for women's political participation in Indonesia"* (Bolland, 2005). Keberhasilan Megawati mencerminkan keberanian dan keteguhan perempuan dalam memperjuangkan hak-hak mereka dan berkontribusi secara signifikan dalam arena politik nasional.

Meskipun terlibat secara aktif dalam Gerakan Reformasi, perempuan juga menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Diskriminasi gender, stereotip sosial, dan kurangnya representasi dalam struktur kekuasaan menjadi beberapa dari tantangan-tantangan tersebut.

Menyadari hal ini, Nursyahbani Katjasungkana, seorang aktivis perempuan, pernah menyatakan, "Perempuan harus memperjuangkan keterlibatan yang lebih besar dalam proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan politik untuk memastikan suara mereka didengar dan kepentingan mereka diwakili secara adil" (Katjasungkana, 2001). Penelitian ini akan berfokus pada bagaimana peran politik perempuan di Indonesia setelah reformasi sejauh mana kontribusinya dalam kebijakan publik?

Metode Penelitian

Kajian ini lebih bersifat deskriptif analitis dengan maksud untuk membuat gambaran secara sistematis, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungkait antara fenomena yang akan diselidiki. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah teknik kualitatif. Untuk memperoleh data-data dalam penyelidikan ini, penyelidik menggunakan buku-buku, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar maupun bahan-bahan dari sumber elektronik yang relevan dengan masalah utama penyelidikan.

Hasil dan Pembahasan

Peran Politik Perempuan Dalam konteks Sejarah Indonesia

Selama berabad-abad, budaya patriarki telah menimbulkan permasalahan kompleks dalam masyarakat. Seringkali tanpa disadari, praktik ini telah membentuk individu ke dalam kategori "laki-laki dan perempuan" yang berbeda, membentuk hierarki di mana beberapa orang dianggap superior sementara yang lain dianggap inferior. Partai-partai superior memegang kekuasaan atas partai-partai inferior (Ritonga, 2016).

Namun sejak abad ke-19, beberapa perempuan Indonesia menjadi tokoh sejarah perjuangan kemerdekaan, seperti Nyi Ageng Serang XIX, Cut Nyak Dien, Christina Martha Tiahahu, Dewi Sartika, R.A. Namun masa penting tersebut merupakan awal mula perjuangan yang mengatasnamakan gerakan perempuan pada tahun 1928, ketika diadakannya Kongres Perempuan pertama di Yogyakarta (Hidayat, 2017).

Sebagaimana biasanya lahir. Hal ini dipicu oleh keinginan untuk mencapai kemajuan yang lebih adil karena struktur sosial dianggap tidak setara. Begitu pula dengan munculnya gerakan perempuan. Secara historis, munculnya gerakan perempuan di berbagai negara di dunia disebabkan oleh kondisi sosial dan politik masing-masing negara. Gerakan perempuan ini lahir dari upaya memperbaiki struktur pemerintahan dan sosial budaya yang kondusif terhadap gejala ketidaksetaraan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan. Seperti yang dinyatakan oleh Moghadam, *“Women’s movements have emerged in response to the specific social, political, and economic conditions of each country, seeking to address systemic gender inequalities and advocate for women’s rights”* (Moghadam, 2005). Upaya ini mencerminkan aspirasi universal untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara, di mana hak-hak perempuan diakui dan dihormati dalam setiap aspek kehidupan.

Sejarah perjuangan perempuan di Indonesia berawal dari kepedulian perempuan terhadap kualitas keluarga. Munculnya gagasan bahwa ibu berperan penting dalam mempersiapkan anak-anaknya menghadapi masa depan menginspirasi para pemikir perempuan untuk membekali diri dengan ilmu pengetahuan. Sebagaimana dijelaskan oleh Blackburn, *“The early women’s movement in Indonesia was significantly driven by the belief that educated mothers were essential for the development of a strong and prosperous nation”* (Blackburn, 2004). Gagasan ini menekankan pentingnya pendidikan bagi perempuan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

Akan membingungkan jika para ibu ditugasi mendidik anaknya tanpa pernah mengenyam pendidikan. Kesadaran akan peran sebagai ibulah yang mendorong perempuan untuk mengejar pendidikan. Dari pernyataan tersebut, perjuangan pembebasan perempuan berkembang menjadi hubungan perkawinan, peran sosial, termasuk hak politik.

Dalam konteks sejarah Indonesia, peran politik perempuan telah mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan berbagai peristiwa penting dalam sejarah bangsa. Sejak era perjuangan kemerdekaan hingga masa Reformasi, perempuan telah berperan aktif dalam politik Indonesia, meskipun dalam beberapa periode mereka menghadapi hambatan dan diskriminasi.

Berikut adalah deskripsi mengenai peran politik perempuan dalam konteks sejarah Indonesia dari zaman ke zaman.

1. Era Perjuangan Kemerdekaan: Selama era perjuangan kemerdekaan, perempuan Indonesia turut aktif dalam pergerakan nasional melawan penjajahan Belanda. Mereka terlibat dalam berbagai aksi demonstrasi, kampanye politik, dan penyelenggaraan rumah-rumah makan revolusioner sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan. Seperti yang diungkapkan oleh Kartini dalam surat-suratnya, peran perempuan dalam masyarakat adalah kunci untuk mencapai kebebasan dan kemajuan bangsa (Kartini, 1964).
2. Era Orde Lama: Di bawah pemerintahan Orde Lama, peran politik perempuan cenderung terbatas. Meskipun demikian, beberapa perempuan berhasil menduduki posisi politik penting, meskipun dalam jumlah yang terbatas. Salah satu contoh adalah Siti Hartinah (Ibu Tien Soeharto), yang menjadi Ibu Negara pada masa pemerintahan Soeharto. Blackburn mencatat bahwa meskipun peran formal perempuan dalam politik terbatas, pengaruh mereka dalam kapasitas informal sering kali signifikan (Blackburn, 2004).
3. Era Reformasi: Masa Reformasi membawa perubahan signifikan dalam peran politik perempuan di Indonesia. Perempuan mulai terlibat dalam berbagai gerakan pro-demokrasi dan advokasi hak asasi manusia. Penunjukan Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Indonesia pada tahun 2001 menjadi salah satu contoh prestasi politik perempuan dalam era Reformasi. Robinson mencatat bahwa era Reformasi membuka jalan bagi perempuan untuk memainkan peran lebih besar dalam politik dan pemerintahan (Robinson, 2009).
4. Partisipasi dalam Pemilihan Umum: Seiring dengan kemajuan demokrasi di Indonesia, partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum juga meningkat. Perempuan terlibat dalam berbagai partai politik, baik sebagai anggota biasa maupun calon legislatif. Meskipun demikian, tantangan seperti stereotip gender dan keterbatasan akses terhadap sumber daya politik masih menjadi hambatan bagi partisipasi politik perempuan. Budianti menyebutkan bahwa meskipun ada kemajuan, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai representasi yang benar-benar setara (Budianti, 2012).

Peran politik perempuan dalam sejarah Indonesia telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan politik dan sosial bangsa. Namun, upaya untuk meningkatkan representasi dan partisipasi perempuan dalam politik masih terus berlangsung hingga saat ini.

Pemberdayaan politik perempuan pasca-Reformasi

Perempuan Indonesia lebih banyak melakukan pekerjaan rumah tangga. Meskipun perjuangan pembebasan perempuan mengupayakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, perempuan yang bekerja di sektor publik seringkali masih harus mengurus keluarga mereka. Secara keseluruhan, perempuan yang bekerja di sektor publik masih dirugikan, dimana perempuan sering kali memiliki akses dan peluang yang terbatas terhadap berbagai posisi dan sering dianggap kurang kredibel dalam menduduki posisi-posisi penting. Seperti yang diungkapkan oleh Suryakusuma, *“Women in Indonesia, despite their significant contributions to both the household and the public sector, often face systemic barriers and discrimination that limit their opportunities for advancement”* (Suryakusuma, 2011).

Secara tradisional, perempuan dirugikan yaitu hanya fokus pada kegiatan keluarga. Bahkan ada Sebuah istilah jargon bagi orang tua yang enggan menyekolahkan putrinya karena paling banter istri yang bisa mengurus keluarga, hal yang terus diwariskan dari generasi ke generasi dan menjadi nilai universal. Dalam masyarakat, laki-laki mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan perempuan.

Hal ini umumnya disebabkan oleh dua masalah utama, yaitu pemahaman budaya dan agama, yang keduanya merupakan penyebab tradisional keterbelakangan sosial perempuan. Dalam pandangan budaya tradisional, perempuan sering kali dilihat sebagai pengurus rumah tangga utama, sementara laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah utama. Pemahaman agama juga sering kali meneguhkan pandangan ini, menempatkan perempuan dalam peran yang lebih subordinat (Blackburn, 2004). Akibatnya, hanya perempuan yang dapat memberikan solusi terhadap masalah yang berdampak pada perempuan, karena laki-laki mungkin tidak sepenuhnya memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi perempuan. Hal ini dikemukakan oleh Robinson yang menyatakan bahwa, *“Only women can effectively address the issues*

impacting their lives, as men may lack the perspective necessary to understand women's needs fully" (Robinson, 2009).

Salah satu masalah yang dihadapi perempuan telah terselesaikan ketika mereka mampu menunjukkan prestasi mereka di bidang politik, karena masalahnya adalah kurangnya representasi mereka di arena tersebut. Partisipasi perempuan dalam politik seringkali terbatas pada hak untuk memilih dan kemampuan untuk memberikan suara dalam pemilu karena posisi mereka yang relatif tidak diuntungkan dalam masyarakat. Namun, hak-hak politik perempuan tercermin dalam arti yang lebih luas melalui partisipasi yang dimobilisasi, yang lebih dari sekedar kemampuan untuk memilih. Seperti yang diungkapkan oleh Blackburn, *"Political rights for women are not just about the right to vote; they encompass a broader range of activities, including the ability to run for office, participate in decision-making processes, and influence policy"* (Blackburn, 2004). Partisipasi aktif perempuan dalam politik memungkinkan mereka untuk menyuarakan kebutuhan dan kepentingan mereka secara langsung, sehingga meningkatkan representasi dan kualitas kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu-isu gender.

Karena keputusan politik berdampak pada setiap aspek kehidupan, kebijakan politik sebenarnya sangat penting dalam upaya pemberdayaan perempuan. Oleh karena itu, ketika menetapkan kebijakan, seluruh jajaran eksekutif harus mendukung kebijakan satu pintu/satu gerbang yang ditetapkan Menteri Pemberdayaan Perempuan untuk mengoordinasikan inisiatif sensitif gender.

Dalam hal idealisme dan pelaksanaan, prospek keterwakilan politik perempuan yang menjanjikan harus dibandingkan dengan kewajiban moral. Semuanya bergantung pada seberapa kuat idealisme dan seberapa gigihnya aktivisme perempuan di ranah politik. Peluang keterwakilan perempuan di legislatif Hal ini sangat bergantung pada berbagai faktor yang sangat berkorelasi, termasuk partai politik, sistem pemilu, proses nominasi, dan hal-hal teknis terkait pemilu seperti protokol pemungutan suara dan *algoritme* untuk memilih pemenang.

Sejak tahun 2004, program tindakan afirmatif telah memfasilitasi lebih banyak partisipasi perempuan. Peluang bangkitnya anggota parlemen perempuan di lembaga legislatif diberikan melalui pengaturan ini. Menurut studi oleh Hillman, *"Affirmative action policies introduced in 2004 have significantly increased the number of women*

in legislative bodies by mandating quotas and providing support for female candidates” (Hillman, 2010). Pengaturan ini tidak hanya membuka jalan bagi lebih banyak perempuan untuk terlibat dalam politik, tetapi juga memastikan bahwa suara perempuan lebih terwakili dalam pembuatan kebijakan. Implementasi kebijakan afirmatif ini telah membantu mengurangi kesenjangan gender dalam bidang politik dan meningkatkan kualitas representasi perempuan di lembaga legislatif. Unsur-unsur sistem pemilu berikut ini harus diperhatikan untuk melihat peluang keterwakilan perempuan: tata cara pemungutan suara, proses pencalonan, batas wilayah utama (DAPIL), dan formula yang digunakan untuk menentukan calon terpilih. Revisi UU Politik di tingkat nasional menjamin sepenuhnya partisipasi perempuan dalam politik. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, harus ada 30% keterwakilan perempuan baik dalam pembentukan dan kepengurusan partai politik di tingkat nasional (Pasal 2 tentang pembentukan partai politik) maupun di tingkat provinsi, kabupaten, dan daerah. tingkat kota (Pasal 20).

Menyusul pembatalan pasal 214 UU Nomor 10 Tahun 2008 yang mengubah kriteria pemilihan calon dari nomor urut menjadi suara terbanyak, diputuskan berakhirnya keterwakilan politik perempuan di DPR/DPRD sesuai rencana UU No. 10/2008 pasal 56 menyatakan bahwa daftar calon yang diajukan parpol memuat paling sedikit 30% keterwakilan Perempuan (Baswir, 2009).

Menindaklanjuti peningkatan keterlibatan politik perempuan, diperlukan tindakan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan posisi keterlibatan perempuan dalam politik. Peran partai politik, khususnya dalam membangun fondasi penting, merupakan salah satu peran penting dalam ekspresi proses demokratisasi. Di Indonesia Saat ini perempuan kurang terwakili dalam kepengurusan partai, sehingga sistem ini belum bisa diterapkan.
- b. Partisipasi perempuan dalam politik perlu menjadi tindakan afirmatif dari segi kualitas. Hal ini berarti harus ada kuota yang mengharuskan perempuan berpartisipasi dalam politik. Masing-masing partai politik memberikan kuota kepada kandidat perempuan ketika memilih wakil di parlemen di sejumlah negara tersebut. Misalnya, Brazil menyumbang 20%, India 33%, dan Argentina 30% dari kuota (Soetjipto, 2011).

Namun, mewujudkan keduanya tidaklah mudah karena masyarakat secara keseluruhan, tidak hanya elit politik, harus berpartisipasi dalam proses perubahan. Oleh karena itu, sistem politik yang sensitif gender akan berkembang jika inisiatif pemberdayaan didukung oleh masyarakat luas. Menurut Center for Asia-Pacific Women in Politics, ada dua isu utama yang menjadi kendala utama ketika membahas pemberdayaan atau partisipasi politik perempuan: "*cultural attitudes that limit women's roles in public life and institutional barriers that restrict their access to political power*" (Politics, 2015). Dukungan masyarakat luas diperlukan untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, sehingga inisiatif pemberdayaan perempuan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

(Subono, 2013) mengemukakan dua kategori itu menggambarkan stereotip gender dalam partisipasi politik perempuan, yang terkait dengan isu dan politik perempuan, khususnya dalam hal kepemimpinan politik yaitu :

- a. Perempuan tidak terlalu pas untuk masuk dalam dunia politik, dan yang lebih khusus lagi duduk di dalam posisi kepemimpinan politik.
- b. Tuntutan yang tinggi bahwa perempuan yang terlibat dalam kekuasaan dan otoritas harus mampusegalanya. Secara tradisi yang merupakan hasil konstruksi sosial atau buatan manusia, ranah publik adalah ranahnya laki-laki dan ranah privat adalah ranahnya perempuan.

Selama ini pada umumnya didasarkan pada keyakinan bahwa perempuan mengelola segala hal dalam rumah tangga, misalnya mengurus orang tua/mertua, suami dan anak-anak. Sehingga kegiatan perempuan di yang bekerja di luar seperti mencari nafkah baik uang maupun yang lainnya, aktif di dalam organisasi atau komunitas, atau bahkan di dunia politik, selalu dilihat sebagai tanggung jawab sekunder.

Selama semua itu tidak meninggalkan tugas dan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, istri, dan anak perempuan yang berada di ranah privat, aktivitas perempuan di ranah publik bisa diterima. Keadaan perempuan belakangan ini mulai memperlihatkan perubahan, termasuk keterlibatan kaum perempuan dalam ranah politik. Namun, seringkali aktivitas kaum perempuan di bidang politik menjadi beban yang berat karena mereka tetap dituntut untuk bertanggung jawab sepenuhnya di ranah privat, yaitu menjalani kodrat sebagai perempuan dalam mengurus rumah tangga.

Kita sudah bisa melihat perempuan duduk memegang posisi-posisi strategis di berbagai bidang, baik itu sosial maupun politik hingga ekonomi. Akan tetapi, persoalannya akan berbeda ketika menyangkut perempuan, karena mereka seringkali harus menyeimbangkan peran ganda. Sebagaimana dicatat oleh Suryakusuma, *“Women’s participation in public life is often conditional upon their ability to fulfill traditional roles in the private sphere, which can impose significant burdens on them”* (Suryakusuma, 2011). Pandangan ini menggarisbawahi tantangan yang dihadapi perempuan dalam mengelola tanggung jawab ganda di ranah publik dan privat.

Harapan tuntutan masyarakat terhadap perempuan sebagai pemimpin memiliki perbedaan bila dibandingkan dengan laki-laki, masyarakat memandang pemimpin perempuan dengan standar harapan dan tuntutan yang tinggi, misalkan kalangan perempuan meskipun sukses menunjukkan kemampuan di dalam bidang kepemimpinan tetapi mereka harus tetap memiliki rasa tanggung jawab terhadap rumah tangga dan keluarga mereka. Merekapun dituntut dengan kualifikasi yang tinggi untuk di tantang layak sebagai seorang pemimpin (Aspinall, 2005).

Kesimpulan

Dalam konteks sejarah Indonesia, peran politik perempuan telah menjadi bagian integral dari perjuangan dan perkembangan politik bangsa. Dari era perjuangan kemerdekaan hingga masa Reformasi, perempuan telah berperan aktif dalam berbagai aspek politik, meskipun seringkali menghadapi hambatan dan tantangan.

Meskipun terbatasnya akses dan stereotip gender telah menjadi kendala, perempuan tetap mampu memperjuangkan hak-haknya dan berkontribusi dalam pembangunan negara. Penunjukan Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Indonesia yang pertama kali pada era Reformasi adalah contoh nyata dari kemajuan perempuan dalam politik Indonesia.

Dengan pendekatan kualitatif dan beragam sumber data, penelitian tentang peran politik perempuan dalam sejarah Indonesia memiliki potensi untuk memberikan wawasan yang mendalam tentang kontribusi perempuan dalam politik. Hal ini diharapkan dapat membuka jalan menuju masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi semua warga negara Indonesia, sesuai dengan semangat perjuangan bangsa untuk meraih kemerdekaan dan kemajuan.

Saran

Berikut adalah beberapa saran yang mungkin berguna:

1. Mendalami Literatur: Mulailah dengan memperdalam pemahaman kelompok perempuan tentang peran politik perempuan dalam sejarah Indonesia melalui literatur terkait, seperti buku, artikel jurnal, dan laporan riset. Ini akan membantu penelitian selanjutnya dalam memahami konteks sejarah, tantangan, dan kontribusi perempuan dalam politik Indonesia.
2. Studi Kasus: Pilih beberapa tokoh politik perempuan yang menarik dalam sejarah Indonesia dan pelajari peran serta kontribusi mereka secara lebih mendalam. Analisis studi kasus dapat memberikan wawasan yang kaya tentang berbagai pengalaman politik perempuan di Indonesia.
3. Kolaborasi dan Diskusi: Diskusikan ide-ide Anda dengan rekan-rekan atau mentor yang memiliki minat yang sama atau pengetahuan yang relevan dalam bidang politik atau sejarah Indonesia. Kolaborasi dapat membantu memperluas perspektif penelitian dan menghasilkan ide-ide yang lebih kreatif.
4. Penelitian Lapangan: Jika memungkinkan, pertimbangkan untuk melakukan penelitian lapangan, seperti wawancara dengan tokoh politik perempuan atau kunjungan ke arsip sejarah. Langkah ini akan memperkaya penelitian dengan data primer dan mendukung pemahaman yang lebih mendalam tentang topik tersebut.
5. Mengembangkan Metode Penelitian: Selidiki berbagai metode penelitian yang sesuai dengan tujuan dan lingkup penelitian, dan pilih metode yang paling cocok untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan tepat. Pastikan untuk mempertimbangkan kekuatan dan keterbatasan masing-masing metode.
6. Konteks Kontemporer: Terakhir, jangan lupa untuk mengaitkan temuan dengan konteks politik dan sosial kontemporer di Indonesia.

Semoga saran-saran ini bermanfaat bagi perjalanan penelitian selanjutnya tentang peran politik perempuan dalam sejarah Indonesia khususnya Perempuan pada masa reformasi hingga kontemporer.

Daftar Pustaka

- Aspinall, E. (2005). *Opposing Suharto: Compromise, Resistance, and Regime Change in Indonesia*. Stanford University.
- Baswir, R. (2009). *Kepemimpinan Nasional, Demokratisasi, dan Tantangan Globalisasi*.
- Blackburn, S. (2004). *Women and the State in Modern Indonesia*. Cambridge University Press.
- Bolland, J. (2005). *Women and Political Power in Indonesia*. Cambridge University.
- Budianti, M. (2012). *Challenges of Gender Representation in Indonesian Politics*.
- Hidayat. (2017).
- Hill, H. (2000). *The Indonesian Economy*. Cambridge University.
- Kartini, R. A. (1964). *Letters of a Javanese Princess*.
- Katjasungkana, N. (2001). *Potret perempuan : tinjauan politik, ekonomi, hukum di zaman orde baru*. Yogyakarta: Pusat Studi Wanita.
- Moghadam. (2005).
- Politics, C. f.-P. (2015). *Women's Political Empowerment and Participation in the Asia-Pacific Region*.
- Ritonga. (2016).
- Robinson, K. (2009). *Gender, Islam, and Democracy in Indonesia*. London: Routledge.
- Schwarz, A. (1999). *A Nation in Waiting: Indonesia's Search for Stability*. Westview Press.
- Sherlock, S. (2009). *The Indonesian Parliament and Democratization*. ISEAS.
- Soetjipto, A. W. (2011). *Politik Harapan (Perjalanan Politik Perempuan Indonesia Pasca Reformasi)*.
- Subono, N. (2013).
- Suryakusuma, J. (2011). *Ibuisme negara : Konstruksi sosial keperempuanan orde baru*. Depok: Komunitas Bambu.

Uhlen, A. (1997). *Indonesia and the "Third Wave of Democratization": The Indonesian Pro-Democracy Movement in a Changing World*. Bandung.

Wahyu. (2018).

Zulminarni, N. (2010).